

KEPENTINGAN TURKI MENOLAK HASIL REFERENDUM SUKU KURDI IRAK TAHUN 2014-2017

**Oleh : M. Luthfi Riesa
e-mail : lutfiriesa93@gmail.com**

**Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430**

Abstract

This paper is a study of Turkey's interest in rejecting the outcome of the Iraqi Kurdish referendum 2014-2017, namely its political interests to the Kurds in Turkey or the Middle East not to follow suit as it will trigger an independent Kurdistan state that includes the territory of Iraq, Iran, Turkey and Syria. Then the economic interests of Turkey, namely the need for petroleum, natural gas is dependent on Iraq. The largest producer of petroleum and natural gas in Iraq is in its northern region which is fully controlled by the Kurdistan Regional Government (KRG). During this time Iraqi Kurds sell their resources to Turkey. Referendums by Iraqi Kurds have the potential to disrupt the Turkish economy as Iraqi Kurds can sell their resources to more countries. Turkey's security interests, with a referendum by the Kurds, will undermine Turkey's domestic and foreign security stability because the PKK (Kurdistan Workers Party) will take advantage of this moment to get other Kurds to do the same. This security interest is related to politics in Turkey.

This paper uses the concept of National Interest in which Turkey directly acts by intervening in the Iraqi government to have the referendum canceled. Supported by foreign policy theory that leads to qualitative research methods as well as literature study as a source of information.

Some of Turkey's foreign policy related to the referendum is intervention to the Iraqi government and KRG, economic sanctions and military training with the Iraqi government.

KeyWords: Referendum, independence, Turkey, Iraq, PKK, KRG, National interests

Pendahuluan

Wilayah Suku Kurdi terdapat di beberapa negara, seperti Turki bagian tenggara, Iran Utara, Irak Utara, Suriah Utara, dan juga terdapat di Soviet Selatan (wilayah yang secara geografis tidak termasuk Timur Tengah). Komunitas Kurdi juga dapat diketemukan di Lebanon, Armenia, Azerbaijan (Kalbajar dan Lachin, sebelah barat Nagorno Karabakh) dan, pada beberapa dasawarsa terakhir, beberapa negara-negara Eropa serta Amerika Serikat. Secara etnis, kaum ini memiliki hubungan dengan suku bangsa Iran. Mereka menggunakan bahasa Kurdi, suatu bahasa Indo-Eropa dari cabang bahasa Iran. Karakter geografis Suku Kurdi yang terdiri dari gugusan perbukitan, struktur sosial yang sangat sarat sentimen tribalisme, serta sistem mata pencarian yang mengandalkan pertanian dan menggembala, memang membuat bangsa dan wilayah Suku Kurdi menjadi semi-eksklusif sepanjang sejarahnya selama sekitar 3.000 tahun. Orang-orang Kurdi sendiri baru memperjuangkan nasib suku bangsa mereka pada Abad XIX. Tepatnya pada 1880, ketika pecah pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh Kurdi, Syaikh Ubaidullah, di Propinsi Hakari yang berada di bawah kekuasaan Dinasti Utsmaniah (Ottoman Empire) Turki. Pada tahun 1897, orang-orang Kurdi menerbitkan sebuah surat kabar

yang diberi nama *Suku Kurdi* untuk yang pertama kalinya. Surat kabar ini mempunyai tujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang budaya dan perjuangan bangsa Kurdi¹. Cita-cita dan perjuangan bangsa Kurdi adalah untuk mendapatkan tanah air mereka sejak awal Abad XIX. Perjanjian Sevres 1920 (Sevres adalah sebuah kota di Prancis) yang memberikan jaminan berdirinya sebuah negara Suku Kurdi Merdeka dalam kenyataannya tidak pernah terealisasi. Orang-orang Kurdi mempunyai sebuah cita-cita untuk mendirikan wilayah Suku Kurdi yang otonom, tempat mereka dapat mengatur diri mereka sendiri serta mempertahankan identitas dan sistem sosial budaya mereka.² Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekuler, dan bersatu. Dibandingkan dengan Irak dan Iran, populasi suku Kurdi di Turki adalah yang terbesar, jumlahnya mencapai 30 juta jiwa. Di Turki, orang-orang Kurdi tiga kali melancarkan pemberontakan secara besar-besaran, yaitu pada 1925, 1930, dan 1937. Semua pemberontakan ini berakhir dengan kegagalan total, sehingga banyak orang Kurdi yang dibantai maupun yang dideportasi oleh rezim Ankara. Perspektif yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu perspektif realisme yang mengutarakan kepentingan nasional oleh **Robert Jackson dan George Sorensen**³, menyatakan bahwa upaya negara untuk

¹ Sihbudi, Riza, M.. 1991. Bara Timur Tengah. Bandung: Mizanhal 136

² Ibid

³ Jackson, Robert dan George Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. Denmark: Oxford University Press, Hal. 34

mengejar power, dimana power atau kekuasaan adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain atau untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Berdasarkan konsep inilah, maka kepentingan nasional dianggap sebagai sarana sekaligus tujuan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam ranah politik internasional. Penulis menggunakan konsep kepentingan nasional sebab hal ini merupakan alasan Turki untuk menolak suku Kurdi Irak dalam melaksanakan referendum. Pada penelitian ini tingkat analisa yang digunakan oleh penulis adalah Negara-Bangsa menurut **Patrick Morgan**⁴ terdapat lima tingkat analisa, yakni (1) individu, (2) kelompok individu, (3) negara-bangsa, (4) kelompok negara-bangsa dalam satu kawasan, serta (5) sistem internasional. Melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Turki terhadap Irak, maka penulis menggunakan tingkat analisa negara-bangsa. Tingkat analisa ini mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan dan yang paling kuat dalam percaturan didunia. Menurut **Joshua Goldstein**, kebijakan luar negeri adalah strategi yang diambil oleh pemerintah dalam aksi mereka di dunia internasional. Penulis juga menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri menurut **Richard Snyder** untuk menjelaskan apa yang melatar belakangi kebijakan tersebut dibuat. Proses pengambilan keputusan luar negeri merupakan alat yang dapat menjelaskan tindakan yang

diambil oleh masing-masing negara dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, negara Turki mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan referendum yang dilakukan oleh suku Kurdi Irak. Penulis mencoba menemukan masalah dalam penentangan tersebut yakni **“Apa Kepentingan Turki menolak hasil referendum suku Kurdi Irak Tahun 2014-2017?”** Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan tentang gambaran suku Kurdi di Timur Tengah;
2. Memberikan penjelasan tentang referendum suku Kurdi Irak 2017;
3. Menganalisa kepentingan politik, ekonomi dan keamanan Turki terkait penolakan hasil referendum suku Kurdi Irak 2017

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif eksplanatif. Penulis akan menjelaskan apa kepentingan Turki dalam proses referendum di Kurdi Irak 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data-data dalam berbagai sumber tulisan. Data-data dalam penulisan sangat berguna dalam pembuktian dari sebuah hipotesa dan pencarian jawaban. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik library research, dengan memanfaatkan buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel dari berbagai media seperti internet ataupun e-book.

Pembahasan

Internasional: Disiplin Ilmu dan Metodologi, Jakarta: LP3ES. Hal.40

⁴ Morgan, Patrick. 1990. *Theories and Approaches to International Politics*, dalam Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan*

Orang Kurdi sebagian besar tinggal di Irak Utara seperti di daerah Ninawa, Arbil, Sulaymayyah, dan al-Ta'min. Orang Kurdi mayoritas menganut agama Islam Sunni dan mereka merupakan kelompok masyarakat non-Arab di Irak yang mempunyai bahasa sendiri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yakni bahasa Kurdi. Fokus perhatian yang luar biasa pada hubungan buruk antara KRG dan Baghdad pada status Kirkuk, Ini bisa dimengerti. Terletak di kawasan yang dihuni oleh campuran kosmopolitan Kurdi, Arab, Turkmens dan Kristen⁵, dan terletak di sebelah ladang minyak terbesar kedua Irak, mengandung 20 persen dari cadangan minyak terbukti negara, Kirkuk telah menjadi subjek abadi perselisihan antara para pemimpin Kurdi dan pemerintah Irak.⁶ Sedangkan di Iran, Sejak revolusi 1979, orang-orang Iran Sunni, sekitar sembilan persen dari populasi Iran dan mayoritas orang Kurdi, jarang dimasukkan ke dalam posisi pemerintahan yang kuat. Gerakan politik di wilayah Kurdi di Iran telah secara konsisten menantang pemerintah pusat, di bawah pemerintahan Pahlavi (yang memerintah dari tahun 1925-1979). Pada bulan Januari 1946, pemimpin Kurdi Iran Ghazi Mohammad menyatakan kemerdekaan

Kurdi dan menamakan dirinya presiden Republik Mahabad yang baru.

Pemerintah pusat Mohammad Reza Shah dengan cepat menekan pemerintahan independen dan secara terbuka menggantung Ghazi Mohammad.⁷ Meski fakta ini luput dari kebanyakan orang luar, Turki adalah multietnis negara muslim hampir homogen. Kurdi adalah salah satu bagian dari keragaman berabad-abad ini, namun dalam beberapa hal mereka menonjol dari kelompok etnis Muslim lainnya di Turki. Kurdi, yang tanah air tradisionalnya terletak di sebelah timur sungai Efrat dan di luar wilayah Utsmaniyah yang utama. Kelompok ini tidak terpapar pengaruh Ottoman di era pramodern sampai tingkat yang sama dengan Muslim non-Turki dari Balkan. Daerah Kurdi sebagian besar otonom dari Istanbul, dan pemimpin daerah yang menguasai tanah-tanah ini bahwa Ottoman disebut Kurdistan.

Namun usaha-usaha untuk mengatasmakan masyarakat Kurdi dan Arab dengan cepat berakhir seiring dengan runtuhnya Kekaisaran. Ketika Republik Turki terbentuk di Anatolia, identitas Ottoman Kurdi tidak memiliki akar yang dalam dari orang Bosnia atau Muslim Balkan lainnya yang sekarang tergabung dalam negara baru tersebut.⁸ Di republik Atatürk, Kurdi berdiri dalam posisi yang unik berhadapan

⁵ Kuncahyono, Trias. 2005. *Bulan Sabit di Atas Baghdad*. Jakarta : Kompas Media Nusantara hal. 132

⁶ Stansfield, Gareth and Liam Anderson. 2017. *Kurds in Iraq: The Struggle Between Baghdad and Erbil*. U.S. : Middle East Policy Council volume XVI No.1

⁷ Human Rights Watch. *You Can Detain Anyone for Anything: Iran's Broadening Clampdown on Independent Activisms*. Januari 2008 Volume 20, No. 1(E)

⁸ Romano, david. 2017. *Iraqi Kurdistan and Turkey: Temporary Marriage?*. U.S : Middle east policy council volume XXII No.1

dengan nasionalisme Turki; jarak penguasa Ottoman meninggalkan mereka dengan cukup identitas etnik mereka sendiri untuk mencegah asimilasi mereka ke dalam etnis Turki baru. Mayoritas Kurdi Suriah berbicara Kurmanji (dialek mayoritas Kurdi yang diucapkan di Turki dan Irak timur laut dan Iran) dan merupakan Muslim Sunni kecuali Yazidis yang tersebar di antara Jazira, wilayah Jabal Siman, lembah Afrin, dan Kurd Dagh.⁹ Namun, orang-orang Kurdi Suriah, karena asal-usul geografis mereka, sejarah mereka, gaya hidup mereka (nomaden / tidak berpindah-pindah), dan pemukiman mereka di lingkungan yang beragam (misalnya Alexandretta, Hawran, Jazira) bukanlah kelompok yang homogen pada awal abad kedua puluh.

Kepentingan Politik Turki

Referendum Irak Kurdistan pada Senin, 25 September 2017 yang mengakibatkan lebih dari 90% suara dalam mendukung kemerdekaan dari Irak, telah memicu perdebatan internasional di antara negara tetangga Irak.¹⁰ Turki memandang referendum kemerdekaan yang sedang berlangsung ini dengan banyak keraguan, dan telah mengutuk proses suara sebagai ilegal dan referendum dirinya sebagai mengancam keamanan regional Turki

dan Irak. Selain itu, negara-negara selain Turki juga prihatin. Secara khusus, Irak dan Iran berbagi sikap yang sama mengenai apa yang telah terjadi di ibukota de facto dari Erbil. Konflik Turki dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) telah berlangsung selama bertahun-tahun di wilayah selatan negara itu serta di perbatasan timur. Namun, dengan Irak, Turki dapat terlibat secara militer diperbatasannya dalam kasus setiap ketidakamanan mungkin atau ancaman yang ditimbulkan oleh pemberontak Kurdi.

Dalam siaran pers lain dari pemerintah Turki, yang dikeluarkan sebelum hari referendum, Turki menyambut baik keputusan yang diambil oleh Dewan Irak di Baghdad dengan mempertimbangkan inisiatif referendum ilegal dan inkonstitusional. Turki mendukung sebelumnya sikap Irak pada apa yang menjadi proses nyata kemerdekaan, yang difokuskan pada referendum yang dilakukan di Erbil, ibukota de facto dari wilayah Kurdistan.¹¹

Seminggu sebelum hari referendum, pasukan Turki dan Irak terlibat dalam latihan militer bersama di perbatasan kedua negara. aktivitas militer ini datang pada saat penting untuk mengirim pesan ke Kurdistan bahwa kedua negara siap untuk

⁹ Tejel, Jordi. 2009. *Syria Kurds, History, politics and society*. USA : Routledge hal. 9

¹⁰ Martin Chulov, "More Than 92% of Voters in Iraqi Kurdistan Back Independence," 28 September 2017, <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/over-92-of-iraqs-kurds-vote-for-independence>. Diakses 09 Maret 2018

¹¹ "Turkish MP Slams Kurdish Referendum as 'Neither Constitutional, Nor Legitimate,'" 27 September 2017, <https://sputniknews.com/analysis/201709271057759463-turkish-mp-kurdish-referendum-illegitimate/>. Diakses 09 Maret 2018

melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk menjaga Irak aman bersatu dan stabil. Turki telah mendapatkan manfaat dari referendum, meskipun, karena kemungkinan penyebab negatif pada penduduk Kurdi di sepanjang perbatasan bersama dengan Irak, karena itu dapat memilih untuk perpanjangan militer Turki di sepanjang perbatasan timur yang tidak stabil.

Demikian juga, sebelum hari referendum, Kerajaan Arab Saudi meminta presiden wilayah Kurdistan Irak, Masoud Barzani, untuk menjadi bijaksana dan mencoba untuk tidak menimbulkan ketegangan politik dengan pemerintah pusat Irak. Dan Uni Emirat Arab, melalui menteri-nya dari negara untuk urusan luar negeri, Anwar Mohammed Gargash, menyatakan keyakinan bahwa federalisme untuk Irak akan menjadi solusi yang lebih baik dan lebih aman untuk daerah. Parlemen Irak dianggap referendum tidak konstitusional dan ilegal. Meskipun, menurut sumber-sumber Kurdi, lebih dari 90% dari orang yang mendukung kemerdekaan, proses referendum itu tidak dipantau atau diawasi oleh organisasi-organisasi internasional. Pengumuman Turki pada menangguk penerbangan dan ancaman untuk menutup Habur ke kota-kota Kurdistan, bersama dengan suspensi sebelum Irak operasi di bandara Kurdistan, hanya upaya untuk mengerahkan kekuasaan atas Erbil. Juga, maksudnya adalah untuk mengingatkan Erbil bahwa ia tidak

memiliki kontrol penuh dari bandara-bandara, di satu sisi, dan di sisi lain, itu tergantung pada perdagangan dengan Turki.

Kepentingan ekonomi Turki

Minyak dan gas alam tetap menjadi sumber utama konsumsi energi Turki dan keinginan KRG untuk mengeksport komoditas yang sama persis ini sesuai dengan permintaan energi Turki dan kebutuhannya untuk diversifikasi. Pada tahun 2011, minyak Kurdi menjadi prospek investasi yang semakin menarik bagi perusahaan minyak global.

Pada bulan November 2011, KRG menyimpulkan perundingan rahasia dengan Exxon Mobil, yang memungkinkan konsesi raksasa energi internasional di 6 blok minyak yang tersebar di sekitar Wilayah Kurdistan, tiga di antaranya terletak di sepanjang wilayah yang masih diperdebatkan oleh Baghdad dan Erbil. Besaran kesepakatan tersebut membuka jalan untuk pembangunan jaringan pipa baru yang menghubungkan ladang minyak di Wilayah Kurdistan ke Pelabuhan Ceyhan di Turki, yang merupakan pintu keluar yang paling mudah diakses untuk minyak Irak Utara.¹²

Meskipun ada keberatan Baghdad, ekspor minyak KRG menyebabkan Ankara dan Erbil memperdalam hubungan mereka yang sedang berkembang. Pada tahun 2012, Turki menjadi aktor nasional pertama yang menandatangani kesepakatan dengan Erbil mengenai ekspor sumber

¹² Humeyra Pamuk & Orhan Coskun, "Exclusive: Turki, Iraqi Kurdistan ink landmark energy contracts," Reuters, 29 November 2013,

<http://www.reuters.com/article/us-Turki-iraq-oilidUSBRE9AS0BO20131129>. Diakses 09 Maret 2018

daya energi. Kesepakatan itu termasuk ketentuan di mana Erbil akan menjual gas alam langsung ke Ankara. Ini adalah langkah pertama Kurdistan untuk memasarkan sumber energinya secara independen dari Baghdad. Pada saat itu, sebagian besar minyak dari wilayah tersebut terus bergerak melalui sistem pipa nasional Irak, termasuk satu jalur langsung antara ladang minyak Tawke yang berada jauh di utara Kurdistan langsung ke pelabuhan Turki di Ceyhan dengan kecepatan 60.000 barel per hari (bpd). Pipa Ceyhan menghubungkan sebagian besar wilayah Irak selatan dan hampir semua sumber energi Daerah Kurdistan ke pasar internasional dan dikendalikan pada akhir ekspor oleh Turki. Kesepakatan dan aliran KRG bersumber minyak mentah ExxonMobil melalui Turki adalah duri dalam hubungan Ankara dengan Baghdad.

Pada tanggal 27 September tiga perusahaan penerbangan Turki menghentikan penerbangan terjadwal antara bandara Turki dan Erbil dan Sulaymaniyah, dan pada tanggal 16 Oktober, wilayah udara Turki ditutup untuk semua penerbangan ke dan dari KRG. Sebagai hasil dari keterlibatan Ankara dengan Baghdad, KRG tidak lagi memiliki kemampuan pra-referendum untuk beroperasi secara independen dari pemerintah pusat dengan bantuan Turki. Investasi Turki di KRG sampai langkah kemerdekaannya adalah indikasi negara pasca-nasionalistik mendekati perselisihan. Desakan Barzani dalam

memegang referendum meski mendapat kritik keras di dalam dan di luar negeri menunjukkan bahwa retorikanya yang kuat mencegahnya mengambil langkah-langkah rasional. Sementara itu, Turki memiliki kekhawatiran yang sah saat menentang upaya kemerdekaan Barzani.

Kepentingan keamanan Turki

Namun, berdasarkan posisi aktor Irak dan regional, orang akan dengan benar berpendapat bahwa desakan KRG terhadap kemerdekaan tidak akan dianggap enteng. Dengan kata lain, "Kurdistan" yang independen akan menjadi sumber yang berkepanjangan dan konflik tidak terkendali, tidak hanya mengirim Irak tapi juga KRG dalam kekacauan.¹³ Turki menilai bahwa risiko konflik tinggi, dan bahwa bentrokan antara Baghdad dan KRG atau perselisihan etnis antara pasukan Peshmerga dan orang-orang Arab-Turkomans akan bunuh diri baik untuk Baghdad maupun Erbil. Ini kemungkinan akan memicu perpindahan internal dan arus pengungsi ke Turki, yang telah menampung ratusan ribu pencari suaka Irak. Ini juga akan menempatkan kepentingan dan investasi Turki di Irak Utara dalam risiko, karena salah satu kondisi utama yang memungkinkan kesepakatan Ankara-Erbil yang berorientasi perdagangan telah menjadi ketenangan dan relatif stabil di KRG.

Turki, oleh karena itu, hanya ingin menghindari konflik lebih jauh yang diperburuk oleh separatisme di depan pintunya. PKK yang telah

¹³ Ulutas, Ufuk. *Barzani's Quest for Independence and Why Turki is against It*.

mendapatkan pengalaman dengan mengisi kekosongan kekuasaan di Suriah, akan menerapkan strategi yang sama di Irak, dan menghubungkannya wilayah yang saat ini dikuasai di Suriah dengan yang sekarang di Irak secara logistik, ekonomi dan bahkan secara politis. Pembuat kebijakan Turki membantah bahwa meski ada persaingan antara PKK dan Barzani.

PKK akan melakukannya sebagai salah satu penerima manfaat utama kemerdekaan sebagai Kelompok teror sangat cocok untuk mengisi kekosongan kekuasaan dan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya ketegangan dan konflik di Irak Utara. Setelah barzani mengadakan referendum kemerdekaan, Turki merasakan dua ancaman utama yang muncul dari gerakan ini: konflik etnis dan kekacauan, dan meningkatnya aktivitas PKK di Irak. Keduanya dianggap sebagai ancaman keamanan nasional dan memerlukan tindakan defensif dan preemptif di sepanjang wilayah perbatasan.¹⁴

Turki telah melakukan operasi militer, yang sebagian besar menentang PKK, berdasarkan perjanjian ini dan kemungkinan skenario peningkatan aktivitas PKK pasca referendum dan / atau pasca kemerdekaan, Turki akan melakukan tindakan defensif dan preemptive di daerah ini. Tindakan militer Turki yang paling mungkin akan bertujuan untuk membatasi atau menghapus PKK di Turki-Irak daerah perbatasan ini memerlukan tindakan militer intensif di wilayah Irak yang pada akhirnya akan menghasilkan

semacam zona penyangga di sepanjang perbatasan dengan fokus khusus pada daerah Qandil dan Sincar. Untuk waktu yang lama Turki ingin memperluas operasi militernya di Irak Utara dalam koordinasi dengan Peshmerga, namun meski mendukung operasi anti-PKK, secara teori Peshmerga tidak banyak membantu Turki untuk mengatasi terorisme PKK yang berasal dari Irak Utara. Tidak diragukan lagi, Turki melihat langkah kemerdekaan KRG dan konsekuensi regionalnya sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Dalam upaya untuk mempertahankan hubungan dekat dengan KRG, Turki akan terus menekan Erbil melalui jalur diplomatik atau ekonomi, dan melalui tindakan politik dan bahkan militer, untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menghormati integritas teritorial dan kesatuan Irak.

Kesimpulan

Turki telah melakukan upaya-upaya untuk menolak hasil referendum yang dilakukan suku Kurdi Irak 27 September antara lain, mengintervensi Irak agar tidak mensahkan hasil referendum tersebut, kemudian melakukan pemboikotan terhadap minyak dari KRG serta melakukan latihan militer di wilayah perbatasan. Seperti halnya banyak negara baru, nampaknya Wilayah Kurdistan tidak akan mendapatkan restu dari beberapa aktor di wilayah tersebut jika menyatakan kemerdekaan, dan

¹⁴ Uyanik, Mehmet. *Turki and the KRG After the Referendum: Blocking the Path to*

Independence. CSIS Turki Project 22 November 2017.

kelahirannya sebagai sebuah negara dapat disertai perang.

Oleh karena itu, kepemimpinan yang berani dan kuat merupakan keharusan bagi Wilayah Kurdistan. Sebuah negara baru dalam pembuatannya juga mensyaratkan minimal legitimasi internasional untuk menjadi independen dan yang mengejutkan saat ini adalah kurangnya reaksi keras terhadap pengumuman mengenai kemungkinan kemerdekaan Kurdi dan perasaan bahwa "baik wilayah dan dunia menjadi semakin reseptif terhadap Kurdistan yang independen. Perpecahan politik adalah masalah yang masih ada di Wilayah Kurdistan mungkin ini adalah penyelesaian yang paling sulit. Sementara euforia awal setelah kemerdekaan mungkin sedikit mengurangi intensitas tantangan ini dalam beberapa bulan pertama, kemungkinan akan muncul kembali sejak awal. Isu pemersatu pasukan Peshmerga telah berada dalam agenda Kurdi Irak selama hampir tiga dekade, dan jelas beberapa langkah besar telah diambil dalam hal ini, walaupun tidak cukup.

Namun, beberapa kesulitan ekonomi akan lebih mudah ditangani begitu Daerah Kurdi mendapatkan kemerdekaan dan mampu mengeluarkan mata uangnya sendiri, mengendalikan nilai tukar, dan mendapatkan pinjaman yang diperlukan untuk membangun negara. Dukungan asing untuk kemerdekaan kemungkinan akan agak diredam. Tidak diharapkan baik Turki atau AS akan memberi KRG lampu hijau, tapi akan menjadi prestasi jika para aktor ini tidak menghadirkan

Barzani dengan lampu merah. Iran mungkin akan terus menjadi lawan setia kemerdekaan Kurdi, namun kemungkinan bahwa hal itu akan menyerang entitas baru ini, kemungkinan untuk mencoba dan memperkuat hubungannya dengan PUK dan bertindak secara subversif dari dalam negara.

Daftar Pustaka

Jurnal :

Human Rights Watch. *You Can Detain Anyone for Anything: Iran's Broadening Clampdown on Independent Activists*. Januari 2008 Volume 20, No. 1(E)

Romano, David. 2017. *Iraqi Kurdistan and Turkey: Temporary Marriage?*. U.S : Middle East Policy Council volume XXII No.1

Stansfield, Gareth and Liam Anderson. 2017. *Kurds in Iraq: The Struggle Between Baghdad and Erbil*. U.S. : Middle East Policy Council volume XVI No.1

Ulutas, Ufuk. *Barzani's Quest for Independence and Why Turkey is against It*. SETA PERSPECTIVE no: 32 September 2017 www.setav.org. Diakses 09 Maret 2018

Buku :

Jackson, Robert dan George Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. Denmark: Oxford University Press

Kuncahyono, Trias. 2005. *Bulan Sabit di Atas Baghdad*. Jakarta : Kompas Media Nusantara

Morgan, Patrick. 1990. *Theories and Approaches to International Politics, dalam Mas'ood, Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Ilmu dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES

Sihbudi, Riza, M.. 1991. *Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan

Tejel, Jordi. 2009. *Syria Kurds, History, politics and society*. USA : Routledge

Uyanik, Mehmet. *Turki and the KRG After the Referendum: Blocking the Path to Independence*. CSIS Turki Project 22 November 2017

Website :

Humeyra Pamuk & Orhan Coskun, "Exclusive: Turki, Iraqi Kurdistan ink landmark energy contracts," Reuters, 29 November 2013, <http://www.reuters.com/article/us-Turki-iraq-oilidUSBRE9AS0BO20131129>. Diakses 09 Maret 2018

Martin Chulov, "More Than 92% of Voters in Iraqi Kurdistan Back Independence," 28 September 2017, <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/over-92-of-iraqs-kurds-vote-for-independence>. Diakses 09 Maret 2018

"Turkish MP Slams Kurdish Referendum as 'Neither Constitutional, Nor Legitimate,'" 27 September 2017, <https://sputniknews.com/analysis/201709271057759463-turkish-mp-Kurdish-referendum-illegitimate/>. Diakses 09 Maret 2018.

